

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aprilia, Theresia, et.al. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hal.2.
- Arbiah, Siti dan Heni Suparti. (2022). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong*. Pubis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. Vol. 6, No. 1. Hal 39-48
- Faradila, Monica dan Achmad Luthfi. (2020). *Analisis Desain Kebijakan Alokasi Bantuan Dana Kelurahan Tahun 2019*, Jurnal Public Policy, hal: 75.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton University Press.
- Hardiyanti, Siti et al. (2021) *Partisipasi Politik Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lubuk Tenam Jambi*. Jurnal Niara. Vol.14 No. 1 Hal. 276-283.
- Kaho, Josef Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmad, Rulinawati. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara, hal. 25.
- Maros, Asra'I et al. (2020). *Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang*. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin, Volume 2.
- Matadou, Satrio Aryanto Hamonagan. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul*. *TheJournalis: Social and Government*. Volume 3 Nomor 4. Hal 267-273
- Melly et al. (2019). *Studi Tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 1, Hal. 8361.
- Muh. Fachrun, Amir Muhiddin, Rudi Hardi, Muh. Randhy Akbar. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kaloka Utara*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. hal 93-111
- Nain, Umar. (2020). *Kajian Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kabupaten Takalar*. Pallangga Praja, hal: 64.
- Rahman, Sitti Nurfatimah. (2016). *Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan di kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, Makassar: Universitas Hasanuddin. Hal. 29.

- Riskayanti, Budi Setiawati, Ansyari Mone. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonmopo Kabupaten Gowa. *Journal Unismuh*, Vol 3 Nomor 3. hal 842-856.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sigalingging, Angelius Henry dan Warijo. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidiakalang Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2 No. 2, Desember.
- Siregar, I. (2001). *Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan*. Tesis. Universitas Indonesia. Depok.
- Sjafrizal. (2009). *Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*, Badaose, Media: Jakarta.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 38-38.
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.165.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Tahun 2004 tentang Kelurahan/ Desa
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri PMK.07/2020 mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
- Peraturan Pemerintahan 30 No 17 Tahun 2018 Pasal 30 Tentang Kecamatan
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
- Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2024
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat.

Artikel

- Apeksi. Dana Kelurahan Tahun 2023 Dipastikan Bakal Cair. <https://apeksi.id/dana-kelurahan-tahun-2023-dipastikan-bakal-cair/> (diakses pada 10 Desember 2023, pukul 11.17).
- Bambang Setiawan. Dana Kelurahan Disikapi Dilematis. <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/12/dana-kelurahan-disikapi-dilematis> (di akses pada 10 Desember 2023, pukul 20.33).
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Semester I Tahun 2022. <https://dataku.salatiga.go.id/>
- Hudesin Abdulsalam. Saat Banyak kelurahan Ingin Jadi Desa Demi Dapat Dana Desa. <https://tirto.id/saat-banyak-kelurahan-ingin-jadi-desa-demi-dapat-dana-desa-dj6y> (diakses pada 6 Juni 2023, pukul 15.12).
- Muh Irwan Susanto. Dari Dana Kelurahan, Lurah Dapet Komisi Ndak ya??. Youtube Kecamatan Tingkir. Menit 2.43. https://www.youtube.com/results?search_query=Dari+Dana+Kelurahan%2C+Lurah+Dapet+Komisi+Ndak+ya%3F%3F%2C+
- Seth Besie. 9 Tahun Menanti. 22 Kelurahan di TTU Segera Beralih Status ke Desa. <https://ttu.inews.id/read/176509/9-tahun-menant-22-kelurahan-di-ttu-segera-beralih-status-ke-des/2> (diakses pada 10 Desember 2023, pukul 21.52).